

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisa yang penulis lakukan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pergantian Antar Waktu (PAW) adalah suatu sistem pengisian jabatan legislatif DPR/DPRD yang diusulkan oleh partai politik atau badan kehormatan DPR tanpa melalui mekanisme pemilihan umum, tetapi dengan melibatkan KPU sebagai tim yang memverifikasi kelengkapan administrasi tentang kelayakan dan kepatutan seseorang untuk mengisi jabatan yang kosong oleh pejabat legislatif sebelumnya. Problematika terjadi dalam menjalankan mekanisme Pergantian Antar Waktu H.M.Rumsyah Bagan di DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dari fraksi Partai Gerindra. Problematika dan keterlambatan yang dihadapi H.M.Rumsyah Bagan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. . Faktor dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diberhentikan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan keterlambatan pergantian antar waktu H.M.Rumsyah Bagan dari fraksi Partai Gerindra di DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Faktor dari eksekutif yaitu Gubernur juga berperan menjadi penyebab keterlambatan Pergantian Antar Waktu, serta faktor dari menunggu antrian keputusan Menteri Dalam Negeri dan Faktor dari peresmian pengangkatan pengganti antar waktu. Terlebih tidak ada aturan

perundang-undangan yang mengatur tentang sanksi dan konsekuensi terkait keterlambatan dalam menjalankan mekanisme pergantian antar waktu bagi pihak – pihak yang terkait menjalankan mekanisme ini.

- 2) Urgensi menjalankan Pergantian Antar Waktu (PAW) harus dilakukan untuk meningkatkan kekuatan dan eksistensi dari Gerindra dan oposisi di parlemen demi membangun kekuatan politik dalam menghadapi pemilihan umum 2019, partai Gerindra dan partai oposisi perlu memiliki kader-kader yang baik dan berkualitas di parlemen untuk mengkokohkan kekuatannya di legislatif. Partai politik mempunyai peranan besar dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Partai Politik menjadi salah satu jembatan dalam menjalankan mekanisme *checks and balances*. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) menjadi salah satu partai yang berkontribusi dalam upaya pengawasan di pemerintahan. Kekuatan dari partai oposisi di legislatif atau parlemen sangatlah diperlukan, tujuannya adalah untuk melakukan pengawasan kepada pemerintah agar terciptanya pemerintahan yang baik dengan menjalankan prinsip *checks and balances*. Selain itu faktor kekosongan yang terjadi dalam lingkup DPRD Provinsi Kalimantan Tengah akibat anggota DPRD Kalimantan Tengah Yansen Binti yang didakwa sebagai pelaku utama pembakaran sekolah dasar di Kota Palangkaraya. Serta beberapa kasus terbaru anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah yang tertangkap tangan KPK dalam perkara limbah sawit di Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, juga menjadi salah

saktu faktor urgensi dilaksanakannya Pergantian Antar Waktu di DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Dan demi menjalankan etika politik yang baik di Indonesia dan Provinsi Kalimantan Tengah khususnya.

B. SARAN

- 1) Berdasarkan kesimpulan yang penulis utarakan diatas, penulis berpendapat bahwa dalam melaksanakan mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) di DPRD Provinsi Kalimantan Tengah seharusnya bisa dilaksanakan tepat waktu sejak permasalahan Zain Alkim yang terbukti melanggar kode etik partai yang seharusnya di berhentikan tetapi demi menjaga harkat martabat beliau maka dinyatakan beliau mengundurkan diri. Berdasarkan hal tersebut harus diciptakan aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai konsekuensi bagi pihak terkait jika tidak menjalankan ketentuan perundang-undangan dalam mekanisme pergantian antar waktu. Apalagi faktor dari pihak yang di berhentikan antar waktu. Karena tujuan di ciptakannya aturan dalam bernegara adalah untuk mengatur keselarasan dan kesejahteraan masyarakat, agar terciptanya negara yang teratur aman dan nyaman, dengan menjunjung prinsip pancasila yang berketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradap, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

- 2) Melihat dari pentingnya kekuatan politik dari sebuah kubu baik di kubu Oposisi maupun Koalisi, maka menjalankan mekanisme dengan baik menjadi penting, apalagi Partai politik mempunyai peranan besar dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Partai Politik menjadi salah satu jembatan dalam menjalankan mekanisme *checks and balances*. Kekuatan dari partai oposisi di legislatif atau parlemen sangatlah diperlukan, tujuannya adalah untuk melakukan pengawasan kepada pemerintah agar terciptanya pemerintahan yang baik dengan menjalankan prinsip *checks and balances*. Penulis harap semua pihak terkait senantiasa menjalankan mekanisme perundang-undangan dengan sebaik mungkin. Demi kemajuan bangsa dan Negara Republik Indonesia.

